

ISBN : 979-3556-43-9

# **PENYUSUNAN BAHAN ADVOKASI DELEGASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN MULTILATERAL**

**Budiman Hutabarat  
M. Husein Sawit  
Bambang Rahmanto  
Supriyati  
Helena J. Purba  
Adi Setyanto**



PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2005

## Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penyusunan bahan advokasi delegasi Indonesia

Dalam perundingan multilatera / Budiman

Hutabarat . . . [et al.]. – Bogor : Pusat

Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian, 2005.

216 hlm. ; 24 cm.

ISBN : 979-3556-43-9

1. Perundingan multilateral – Indonesia.

1. Hutabarat, Budiman.

337.1

Desain dan Tata Letak :

Agus Suwito

Diterbitkan oleh :

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Departemen Pertanian

Jl. A. Yani No. 70, Bogor

Telp. : (0251) – 333964

Fax. : (0251) – 314496

E-Mail : [caser@indosat.net.id](mailto:caser@indosat.net.id)

Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

ISBN : No. 979-3556-43-9

Hak Cipta pada penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

## KATA PENGANTAR

Penelitian “Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia Dalam Perundingan Multilateral” merupakan salah satu dari 17 judul penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) TA. 2004 yang dibiayai oleh APBN. Laporan hasil penelitian ini merupakan laporan penelitian terbaik ketiga pada TA. 2004. Penilaian dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 3 orang staf pengajar jurusan Sosek, Faperta-IPB dan 1 orang peneliti senior PSEKP. Sebagai apresiasi, dan untuk menyebarkanluaskannya kepada pihak pengguna, maka PSEKP pada TA. 2005 menerbitkan laporan hasil penelitian tersebut. Saya menyampaikan selamat untuk peneliti dan semoga lebih giat lagi meningkatkan prestasinya.

Isu perdagangan internasional dalam bidang pertanian sangat kompleks dan dinamis. Telah banyak dilakukan perundingan-perundingan baik di tingkat menteri antar negara maupun pejabat yang lebih tinggi untuk mencapai kesepakatan dalam bidang perdagangan. Namun sering kali perundingan tersebut mengalami kebuntuan. Masing-masing kelompok negara memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau World Trade Organization/WTO sebagai kesepakatan yang mengatur perdagangan multilateral melalui UU No.7 tahun 1944 tentang pengesahan Perjanjian Pembentukan OPD. Sebagai akibatnya, Indonesia berkewajiban menerapkan perjanjian-perjanjian OPD yang bertujuan menciptakan liberalisasi perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. Berhubung lingkungan strategis yang terjadi di dalam dan di luar perekonomian dan politik Indonesia ini berkembang secara dinamis dan terjadwal, adalah sangat diperlukan masukan informasi dan data tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dan antisipasi kebijakan yang harus dirumuskan oleh para penentu kebijakan di sektor pertanian dan oleh para juru runding atau delegasi negara di berbagai forum perundingan.

Laporan ini merupakan hasil penelitian berbagai perkara yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan multilateral antara lain pengkajian ulang perundingan-perundingan OPD dan pandangan Indonesia, penentuan dan usulan Mekanisme Perlindungan Keamanan Khusus/MPKK atau Special Safeguard Mechanism/SSM, bantuan domestik Indonesia, Produk Strategis/PS atau Strategic Products, dampak liberalisasi perdagangan global terhadap dinamika perdagangan luar negeri komoditas berbasis pertanian di Indonesia, usulan modalitas Blended Formula dan Tiered Formula.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Tim Peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tersusunnya laporan ini. Semoga hasil studi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya memantapkan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas pertanian di pasar dunia.

Bogor, September 2005

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto  
NIP. 080 035 289

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan Penelitian.....	3
Sasaran Akhir .....	4
Perkiraan Dampak .....	4
TINJAUAN PUSTAKA .....	5
Jadwal Perundingan Pertanian (PP) .....	5
Hasil Perundingan KTM V di Cancun dan Agenda Indonesia Pasca Cancun, Arah dan Kerangka Penyusunan Bahan Advokasi Perundingan Multilateral Pertanian .....	6
Pendekatan Penelitian.....	12
METODE PENELITIAN.....	17
Lokasi Penelitian.....	17
Sumber Data dan Informasi.....	17
Metode Analisis.....	18
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
Kaji Ulang Beberapa Provisi Penting dalam OPD .....	40
Bantuan Domestik Sektor Pertanian Indonesia Tahun 2001 - 2003.....	100
Penyaringan Produk Strategis/PS atau Khusus/PK dengan Metode Input-Output untuk Indonesia.....	107
Dampak Liberalisasi terhadap Perdagangan Kelompok Komoditas Berbasis Pertanian .....	115
Identifikasi dan Inventarisasi serta Usulan Modalitas .....	169
Perkiraan Dampak Hasil Penelitian .....	187
DAFTAR PUSTAKA.....	190

## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Jadwal Perundingan Pertanian/PP (Agreement on Agriculture/AoA).....	7
2.	Indikator dan Kriteria untuk Product Strategis/Produk Khusus (PK) menurut Simatupang (2003) .....	22
3.	Kriteria Sektor/Produk Kunci dan Penyaringan PK dengan Metode I-O .....	27
4.	Asumsi yang digunakan dalam skenario PU.....	30
5.	Asumsi yang digunakan dalam skenario Kompromi.....	30
6.	Rataan Tarif Terikat Negara Maju (NM) dan Negara Berkembang (NB).....	31
7.	Daftar Pengelompokan Negara-negara Mitra Dagang yang Dipostulatkan dalam Model.....	32
8.	Daftar Skenario Kebijakan dalam Simulasi Model Kebijakan Perdagangan Pertanian Mitra Dagang.....	33
9.	Kerangka Rumus Gabungan Penurunan Tarif bagi NB .....	36
10.	Simulasi Modalitas RG Produk Pertanian Indonesia.....	37
11.	Pemotongan Tarif : Penerapan Rumus Berjenjang dengan R-PU dan 3 Alternatif.....	37
12.	Pemotongan Tarif: Penerapan Rumus Berjenjang dengan RS dan 5 Alternatif .....	38
13.	Kelompok Tarif dari Tingkat Tarif dan Produk Khusus/PK, dan Struktur Tarif Produk Pertanian Indonesia.....	39
14.	Ketentuan-ketentuan pokok dalam Agreement on Safeguard .....	74
15.	Cakupan Pelayanan, Cakupan Data dan Tolok Ukur yang Digunakan Untuk Menghitung Bantuan Pelayanan Umum/DPU bagi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia .....	101

16.	Ukuran Dukungan Domestik Indonesia dalam Kotak Hijau Tahun 2001 – 2003.....	104
17.	Ukuran Dukungan Domestik Indonesia dalam Kotak Hijau Tahun 1995 – 2000.....	105
18.	Indikator dan Kriteria Produk Khusus.....	111
19.	Sejumlah Kriteria Terpilih untuk Menyaring PK.....	112
20.	Sektor/Produk Kunci Sebagai Produk Khusus.....	114
21.	Deskriptif Statistik Nilai Ekspor Kelompok Komoditas Pertanian Indonesia, 1990-2002.....	119
22.	Deskriptif statistik nilai impor kelompok komoditas pertanian Indonesia, 1990-2002.....	120
23.	Deskriptif Statistik Neraca Perdagangan Kelompok Komoditas Pertanian Indonesia, 1990-2002.....	123
24.	Perbandingan Neraca Perdagangan Kelompok Komoditas Pertanian Indonesia sebelum dan Setelah Implementasi Perjanjian Liberalisasi Perdagangan Global, OPD-1994.....	124
25.	Tingkat Pertumbuhan Perdagangan Kelompok Komoditas Pertanian Indonesia Sebelum dan Setelah Implementasi Perjanjian Liberalisasi Perdagangan Global, OPD-1994.....	126
26.	Pengaruh Liberalisasi Perdagangan global dan Dinamika Ekonomi Politik Domestik terhadap Neraca Perdagangan Kelompok Komoditas Berbasis Pertanian terpilih, 2004.....	128
27.	Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Harga Konsumen dan Produsen Domestik di Indonesia (Skenario PU untuk berbagai kelompok komoditas) .....	135
28.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Beras dan Susu dan Kebijakan TRQ Beras dan Susu Indonesia terhadap Harga Konsumen and Produsen Domestik di Indonesia (Skenario PU).....	136
29.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Perubahan Kesejahteraan dan Penerimaan Pemerintah (juta \$ AS).....	137
30.	Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perubahan Ekspor dan Impor (Skenario PU).....	139

31.	Dampak liberalisasi terhadap harga konsumen dan produsen domestik di Indonesia (Skenario kompromi untuk berbagai kelompok komoditas).....	141
32.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Beras dan Susu dan Kebijakan TRQ Beras dan Susu Indonesia terhadap Harga Konsumen dan Produsen Domestik di Indonesia.....	142
33.	Dampak Perubahan Beberapa Skenario Kompromi dari UE Proposal terhadap Distribusi Kesejahteraan (Juta \$ AS) .....	143
34.	Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Konsumsi, Produksi, Ekspor dan Impor Skenario Kompromi untuk Berbagai Kelompok Komoditas .....	145
35.	Dampak Penerapan Tarif, Dukungan Domestik dan Subsidi Ekspor terhadap Perubahan Harga Konsumen, Impor, Surplus Konsumen, Produksi dan Ekspor (%).....	147
36.	Produk-produk Ekspor-Impor Komoditas Pertanian Indonesia Terpilih dan Mitra Dagang Utama .....	152
37.	Konfigurasi Parameter Perdagangan Negara Produsen, Eksporthir, dan Importir Komoditas Tanaman Pangan Terpilih .....	154
38.	Konfigurasi Parameter Perdagangan Negara Produsen, Eksporthir, dan Importir Komoditas Peternakan Terpilih .....	156
39.	Konfigurasi Parameter Perdagangan Negara Produsen, Eksporthir, dan Importir Komoditas Perkebunan Terpilih.....	158
40.	Hasil Simulasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses pasar, Subsidi ekspor, dan Dukungan domestik Negara-negara Mitra Dagang terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Tanaman Pangan Indonesia.....	162
41.	Hasil Simulasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses pasar, Subsidi ekspor, dan Dukungan domestik Negara-negara Mitra Dagang terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Peternakan Indonesia .....	166
42.	Hasil Simulasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses pasar, Subsidi ekspor, dan Dukungan domestik Negara-negara Mitra Dagang terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Perkebunan Indonesia .....	167

43.	Tingkat Bantuan untuk Sektor Pertanian di negara OECD, khususnya UE dan AS ( Milyar \$ AS).....	172
44.	Rata-Rata Sederhana Tingkat Tarif Produk Pertanian Indonesia: Penerapan Rumus Gabungan dan PK .....	181
45.	Pemotongan Tarif dengan R-PU: 3 Alternatif.....	184
46.	Pemotongan Tarif dengan Rumus Swiss/RS: 5 Alternatif.....	185



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	MPKK terpisah dari PK .....	83
2.	PK subset dari MPKK.....	84
3.	Ada PK masuk dalam MPKK.....	84
4.	Harga pemicu .....	91
5.	Volume pemicu.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
	Ringkasan Posisi Masing-Masing Kelompok Negara .....	194
1.	Perkiraan Nilai Biaya Pelayanan Umum/BPU Untuk Penelitian Pertanian Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	198
2.	Perkiraan Nilai BPU Untuk Pengendalian Hama dan Penyakit Pertanian Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	198
3.	Perkiraan Nilai BPU Untuk Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	199
4.	Perkiraan Nilai BPU Untuk Bimbingan dan Penyuluhan Pertanian Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	199
5.	Perkiraan Nilai BPU Inspeksi dan Pengawasan Pertanian Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	200
6.	Perkiraan Nilai BPU Untuk Promosi dan Pemasaran Pertanian Indonesia 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	200
7.	Perkiraan Nilai BPU Untuk Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan Indonesia Tahun 2001 – 2003 (Rp. Juta).....	201
8.	Domestic Support: Indonesia Reporting Period: Calender Year 2001 .....	202
9.	Domestic Support: Indonesia Reporting Period: Calender Year 2002 .....	204
10.	Domestic Support: Indonesia Reporting Period: Calender Year 2003 .....	207
11.	Indeks Derajat Penyebaran dan Derajat Kepekaan untuk Produk Pertanian: Tabel I-O, 2000 .....	210
12.	Multiplier Upah/Gaji dan Nilai Tambah; Koefisien dan Jumlah tenaga Kerja Tiap Sektor yang Terkait dengan Produk Pertanian : Tabel I-O, 2000.....	212
13.	Industri Kunci Menurut Indeks Derajat Penyebaran (DP) dan Ranking Sektor Kunci: Tabel I-O, 2000 .....	214

---

14. Industri Kunci Menurut Indeks Derajat Kepekaan (DK) dan Ranking Sektor Kunci: Tabel I-O, 2000 .....	215
15. Industri Kunci Menurut Indeks Derajat Penyebaran (DP) atau Derajat Kepekaan (DK) : Tabel I-O, 2000.....	216

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap aturan perdagangan dunia tidak dapat lagi dibatasi secara penuh, mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau World Trade Organization/WTO dan anggota aktif berbagai asosiasi ekonomi regional. Telah hampir sepuluh tahun usia OPD terbentuk sejak tahun 1995 sebagai kelanjutan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) melalui kesepakatan hampir 140 negara di dunia yang diharapkan dapat menciptakan tatanan dan iklim perdagangan dunia yang semakin terbuka dan memungkinkan pertumbuhan perekonomian dunia tetap berjalan pada tingkat yang tinggi. Negara anggota tentunya juga berharap agar iklim perdagangan yang terbuka ini akan memberi keuntungan bagi para pelaku perdagangan, sehingga perekonomiannya juga dapat bertumbuh dengan baik. Sampai saat ini dan untuk selanjutnya lembaga ini akan terus bergerak untuk mewujudkan tujuan yang ditugaskan kepadanya. Setiap negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut sepatutnya melaksanakan janjinya, sehingga dengan kata lain kesepakatan dalam OPD akan menjadi acuan utama setiap negara anggota dalam mereformasi atau merumuskan kebijakan perdagangannya masa kini. Dampak positif dan negatif keputusan OPD yang ditransformasikan kepada kebijakan dalam negeri suatu negara telah dirasakan berbagai masyarakat, negara, perkumpulan berbagai negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung.

Kesediaan berbagai negara dunia untuk melakukan perundingan dan pada akhirnya juga menyetujui terbentuknya lembaga perdagangan internasional, seperti OPD sepatutnya dihargai mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya pada perundingan GATT di berbagai putaran, kesepakatan ini sulit dicapai. Salah satu bidang yang sangat sulit dicapai persetujuannya oleh berbagai negara adalah isu-isu di bidang pertanian.

Hingga kini OPD telah melakukan lima kali pertemuan tingkat menteri, terakhir pada tanggal 10-14 September 2003 di Cancun, Meksiko, yang membahas berbagai isu penting berdasarkan usul dari negara-negara anggota dan sekretariat OPD yang ingin diselesaikan secara demokratis di dalam sidang OPD. Namun, disayangkan pada persidangan tingkat menteri yang kelima ini pertemuan menghadapi jalan buntu tanpa kesepakatan berhubung adanya kesenjangan aspirasi dan harapan dari berbagai negara atau kelompok negara, terutama antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini memang bukan sesuatu yang luar biasa karena masing-masing negara berkepentingan dengan nasib masyarakat dan perekonomiannya juga dan landasan ekonomi setiap negara ini tidaklah sama. Tentu saja kebuntuan perundingan ini tidak diinginkan oleh siapapun dan oleh karena itu masing-masing negara atau kelompok negara dengan caranya masing-masing pasti telah berusaha menggalang

dukungan agar aspirasi dan harapan kelompoknya dapat dipertimbangkan pada persidangan tingkat menteri berikutnya. Inilah salah satu segi positif dari adanya OPD yang memiliki agenda dan jadwal perundingan secara teratur dan ini pulalah salah satu kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia agar dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi perundingan.

Selain dalam forum seperti OPD, Indonesia juga mempunyai dan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang bersifat regional, substansial, atau unilateral, seperti misalnya APEC, AFTA, Cairns Group, dan yang terakhir kelompok 33 negara berkembang dengan mengusung kepentingan, cita-cita dan sasaran masing-masing. Lagi pula, Indonesia juga memiliki negara-negara mitra dagang komoditas pertanian baik yang telah berlangsung sejak lama dan masih berjalan dan aktif hingga kini. Sehingga, meskipun OPD tetap melaksanakan agendanya, hubungan dagang tradisional apalagi yang baru antar dua negara tetap dengan hukum-hukum yang telah berlaku berabad-abad dan tidak bertentangan dengan azas-azas OPD akan tetap berlaku walaupun harus melakukan penyesuaian. Semuanya ini bersifat strategis dan sangat menentukan perkembangan ekonomi dan sektor pertanian dan agribisnis Indonesia. Jadi, pada dasarnya Indonesia saat ini sedang menghadapi proses perubahan lingkungan strategis, baik yang datangnya dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar.

Perubahan-perubahan tersebut dipastikan akan memberikan pengaruh positif pada pembangunan pertanian, demikian pula pada setiap subsektor dan komoditasnya selama kebijakan dan program yang dijalankan mampu mengantisipasi serta memanfaatkan perubahan dan tantangan tersebut untuk mengembangkan sistem agribisnis komoditas dan sebaliknya menjadi bencana apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara cermat, waspada dan bijaksana. Hal ini misalnya, sangat jelas pada kasus beberapa komoditas penting di sektor pertanian dan perekonomian Indonesia, yakni gula, beras, jagung dan kedelai yang menjadi fokus penelitian ini. Saat harga dunia ke empat komoditas ini yang lebih rendah, seperti sekarang ini tentu saja akan menimbulkan rangsangan yang sangat kuat untuk memasukkan impor ke pasar dalam negeri. Namun, dengan membuka lebar-lebar pasar dalam negeri atas komoditas-komoditas tersebut pada saat ini, maka sistem agribisnis dan industri di dalam negeri akan terancam karena tidak mampu menyaingi harga komoditas impor yang lebih rendah. Sebaliknya, menutup rapat pasar dalam negeri terhadap impor tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perdagangan dunia yang dicanangkan oleh OPD.

Saat ini gula dan beras dalam negeri berada dalam skema kebijakan yang menyeimbangkan kesejahteraan konsumen dan produsen, melalui instrumen Tata Niaga Impor Gula yang diatur oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 untuk gula dan INPRES 9/2002 untuk beras. Izin impor gula dibatasi bagi importir terdaftar (IT) yang menyerap 75 persen

tebu petani dan impor ini dibebani tarif sebesar Rp. 700/kg dan hanya pada masa-masa di luar masa giling tebu pabrik gula. Impor dilakukan untuk menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen dengan tarifnya sebesar Rp. 430/kg dan hanya dapat dilakukan pada musim kemarau atau paceklik. Sementara itu untuk jagung dan kedelai belum ada kebijakan khusus yang dilakukan pemerintah, tetapi kebutuhan itu ada mengingat kedua komoditas ini juga tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi petaninya, sehingga kurang berkembang baik dari segi areal maupun produksinya.

Berhubung lingkungan strategis yang terjadi di dalam dan di luar perekonomian dan politik Indonesia ini berkembang secara dinamis dan terjadwal, adalah sangat diperlukan masukan informasi dan data tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan sertaantisipasi kebijakan yang harus dirumuskan oleh para penentu kebijakan di berbagai subsektor pertanian dan agribisnis terutama oleh para juru runding atau delegasi negara diberbagai fora. Untuk memperoleh pemahaman yang benar bagaimana liberalisasi perdagangan dapat memberi sumbangan terhadap tujuan pembangunan dan mendapatkan saran untuk meningkatkan mutu kebijakan yang tepat, diperlukan penelitian dan analisis kebijakan yang bersifat teknis pada setiap pokok perundingan dan tentang kebijakan dan alternatifnya yang secara khusus diarahkan kepada isu-isu perdagangan pertanian yang berdinamika tinggi ini. Semua hasil-hasil analisis dan saran-saran kebijakan ini harus dibahas secara mendalam dan diperdebatkan oleh semua kalangan yang terkait, yaitu petani dan asosiasi produsen, pedagang dan asosiasi pedagang, pedagang pengeksport dan pengimpor, pengolah dan industriawan, serta kalangan swasta lain, LSM, penentu kebijakan di daerah dan di pusat untuk mendapatkan sebuah proposal atau posisi yang dapat diterima semua pihak.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji ketentuan dan skema perlakuan khusus dan berbeda/PKB (special and differential treatments/SDT), special safeguard mechanism/SSM, least-developed and net food-importing developing countries dan kerangka Perjanjian Pertanian/PP atau Agreement on Agriculture serta relevansinya terhadap komoditas dan sektor pertanian Indonesia.
2. Mengkaji metode perhitungan green box dan domestic support untuk komoditas dan sektor pertanian terutama komoditas yang dianggap strategis.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kriteria dan justifikasi petentuan komoditas yang dianggap produk strategis/produk khusus/PK (strategic product/SP)
4. Menganalisa penetapan dan kemungkinan penggunaan mekanisme tariff rate quota (TRQ), domestic support dan export subsidy pada

komoditas pertanian dalam negeri untuk memperkuat agribisnis komoditas tersebut dan menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, petani produsen, dan konsumen dalam negeri,

5. Mengkaji dampak resiprokal penetapan dan penggunaan mekanisme tariff rate quota (TRQ), domestic support dan export subsidy, serta border measures lainnya pada komoditas pertanian yang dilakukan oleh negara mitra dagang Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat, petani produsen, dan konsumen dalam negeri,
6. Melakukan identifikasi dan inventarisasi modalitas perundingan multilateral saat ini dan arah ke depan.
7. Menyusun berbagai usulan, rekomendasi dan rumusan alternatif kebijakan modalitas tarif, penurunan tarif dan jadwal pelaksanaannya.

### Sasaran Akhir

Diperoleh data dan informasi tentang:

1. Pengkaji ulangan naskah perjanjian perdagangan pertanian internasional yang berkaitan dengan keadaan sektor pertanian Indonesia dan kemampuan penyesuaiannya terhadap arus globalisasi.
2. Pengaruh isu dan kinerja perdagangan internasional/regional/unilateral terhadap komoditas dan sektor pertanian Indonesia.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan multilateral/regional/unilateral komoditas dan sektor pertanian Indonesia.
4. Kinerja pasar domestik dan ekspor berbagai komoditas pertanian Indonesia.
5. Pengaruh modalitas liberalisasi perdagangan komoditas pertanian terhadap harga komoditas pertanian, kesejahteraan dan konsumsi masyarakat, ekspor dan penerimaan pemerintah Indonesia.
6. Pengaruh kebijakan perdagangan negara mitra dagang Indonesia terhadap harga komoditas pertanian, kesejahteraan dan konsumsi masyarakat Indonesia.
7. Rumusan dan usulan posisi dan kebijakan Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan multilateral di bidang pertanian.

### Perkiraan Dampak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijaksanaan, khususnya dalam merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi penerapan liberalisasi perdagangan pada komoditas strategis sehingga mampu bertahan dan melakukan penyesuaian terhadap persaingan internasional.